



PERSEPSI DAN RESPON PERUBAHAN RUANG SAKRAL

Oleh:
Ari Djatmiko¹

¹ Dosen Tetap Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Pasundan Bandung, Jabatan Fungsional Lektor, email : aridjat@gmail.com

ABSTRAK

Unsur-unsur konsepsi ruang relasional mencakup kekuatan ekonomi dan politik yang mempengaruhi perubahan ruang sakral; persepsi dan respon masyarakat akibat dorongan dan kekuatan yang akan melakukan perubahan ruang sakral, pemahaman masyarakat tentang hakekat ruang sakral serta pola perubahan ruang sakral yang terbentuk. Selain itu, dapat diuraikan pula elemen-elemen berupa pengetahuan masyarakat mengenai ruang sakral dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang sakral tersebut sebagai elemen yang mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat.

Dalam konteks ruang relasional, faktor politik ekonomi diwujudkan dengan proses pemaknaan ruang yang berlandaskan pada aspek mental atau pemikiran ruang dari aktor pelaku usaha, profesional, dan pemangku kepentingan, yang dikenal sebagai *conceived space/representation of space* (representasi ruang). Sedangkan faktor budaya diwujudkan dengan proses pemaknaan ruang yang berlandaskan aspek fisik dan sosial atau pemikiran ruang berdasarkan pemaknaan dan pengalaman hidup warga adat, yang dikenal sebagai *perceived space/spatial practice* (praktek ruang) dan *lived space/representational space* (ruang representasional).

Kata Kunci: Unsur-unsur konsepsi ruang relasional, perubahan ruang sakral; persepsi dan respon masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Permasalahan Perubahan Ruang Sakral

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal. Namun karena bersaing dengan budaya luar, nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut semakin memudar. Budaya luar mempersempit ruang gerak tradisi lokal dan sistem keberagaman yang ada. Lebih lanjut kearifan budaya lokal bukan hanya kehilangan makna dan saling

berebut peran, tetapi juga kehilangan kekuatan dan daya juangnya saat peran negara melemah (Mulkham, 2006 dalam Saraswati, 2009).

Budaya sebagai sebuah sistem selalu mengalami perubahan dan perkembangan melalui dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar sistem tersebut. Perubahan budaya mencakup perubahan unsur-unsur berupa nilai, aktivitas dan wujud fisik. Perubahan budaya tersebut terjadi sebagai bentuk proses adaptasi dan belajar manusia, yang menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik.

Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan ruang (Maran, 2000; Lauer, 2003; Suparlan 1977 dalam Sukawati, 2008). Ruang merupakan simbolisasi dari kesepakatan bersama sebagai wadah untuk beraktivitas baik bekerja, rekreasi, ataupun bertempat tinggal, serta aspirasi/cara pandang hidup masyarakat dalam mengelola ruang secara bersama-sama. Perubahan ruang dapat memberikan pengaruh terjadinya perubahan pandangan dan pola aktivitas masyarakat serta timbulnya dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang bersifat menguntungkan maupun merugikan.

Perubahan budaya dan ruang dapat dijelaskan pula melalui teori dialektika yang diungkapkan Lauer (2003: 90, dalam Sukawati, 2008). Lauer (2003) menyatakan bahwa terjadinya perubahan adalah akibat adanya kekuatan yang saling mempengaruhi atau berlawanan, Kontradiksi kekuatan tersebut diwujudkan dengan interaksi *stakeholders* baik masyarakat, pemerintah, pelaku usaha atau aktor lain. Kontradiksi tersebut dapat diindikasikan antara lain berupa dominasi ekonomi terhadap budaya lokal (Jackson, 1991b dan 2000b; Su, 2007). Selain faktor ekonomi, perubahan ruang dipengaruhi pula beragamnya kekuatan yang bekerja pada ruang (Yusuf, 2015), yakni faktor politik-ekonomi (Harvey, 1989; Fanstein, (2005), politik-ekologi (Swyngedouw dan Heynen, 2003; Latour, 2004; Murdoch, 2006), dan sosial budaya (Sundercock, 1998). (UNISDR, 2002, 2004; Paton, 2006; Kelman dan Mather, 2008). Lebih lanjut diungkapkan bahwa Sandercock (1998) menilai ruang sebagai “rainbow region”, yaitu wilayah dengan berbagai kepentingan Menurut Sandercock (1998: 3), di wilayah tersebut akan timbul permasalahan seperti, ‘*who belongs where?*’ dan *with what citizenship rights?*

Ruang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sesuai dengan aktivitas masyarakat

yang memanfaatkannya, yakni ruang sakral (berkaitan dengan kegiatan agama) dan ruang profan (berkaitan dengan kegiatan sosial) (Eliade, 2002; Dove, 1979 dalam Sasongko; Santhayasa, 2010). Ruang sakral mengacu pada ruang atau tempat yang bersifat suci, dianggap suci, atau dipergunakan untuk keperluan religi; sedang ruang profan adalah ruang yang “biasa-biasa saja”, yang dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut diungkapkan bahwa ruang sakral terdiri atas ruang yang digunakan untuk keperluan sendiri atau keluarga sendiri dan ruang yang digunakan untuk kepentingan bersama atau umum.

Ruang sakral dinyatakan sebagai bangunan atau obyek utama yang memiliki nilai sakral. Perubahan ruang sakral dapat dinilai dari sisi internal sebagai adanya perubahan unsur-unsur fisik pada ruang atau obyek tersebut seperti perubahan fungsi baik penambahan ataupun pengurangan; perubahan tata letak dan orientasi serta perubahan luas ruang. Selain itu perubahan ruang sakral dapat dinyatakan pula dari sisi eksternal dengan mempertimbangkan perubahan ruang sekitarnya/berbatasan yang dapat mempengaruhi nilai kesakralan bangunan atau obyek sakralnya, seperti perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat, perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya (disarikan dari Gideon, dalam Sasongko, 2006; Anindya, 1991; Sudaryono, 2006).

Perubahan ruang sakral dapat terjadi pada ruang publik maupun ruang privat. Perubahan ruang sakral yang melebihi batas yang disepakati serta menimbulkan gangguan atas kegiatan ritual dan mengakibatkan pencemaran kesakralan. Pengaruh negatif ini mengindikasikan adanya kontradiksi antara unsur luar/eksternal dengan unsur dalam (masyarakat lokal) yang menimbulkan

penurunan/pencemaran dan penghancuran nilai-nilai kesakralan (Linenthal, 1995). Perubahan ruang sakral yang bersifat ruang publik yang menimbulkan pencemaran kesakralan akan memberikan pengaruh negatif terhadap sosial budaya masyarakat. Demikian pula pada ruang privat, masyarakat juga dapat melakukan perubahan ruang sakralnya sebagai bentuk respon atas perkembangan kondisi internal dan tekanan eksternal.

Ruang sakral juga mengandung tingkat kesakralan yang berbeda-beda disesuaikan dengan aktivitas sakral yang dapat dilakukan dan aktivitas profan yang tidak diperbolehkan pada ruang tersebut. Perubahan pada ruang yang tertinggi tingkat kesakralannya sangat sulit dilakukan. Semakin sakral suatu ruang maka semakin terbatas kemudahan memanfaatkan ruang tersebut untuk kegiatan profan, demikian sebaliknya.

Menurut Rapoport (1968 dalam Susongko, 2003), perubahan ruang sakral dan profan tidak selalu terjadi pada seluruh unsur yang ada. Terdapat unsur fisik yang berubah (*change*) dan unsur fisik yang tetap atau bertahan (*constancy*). Rapoport mengungkapkan pula bahwa perubahan masih menyisakan unsur fisik yang dipertahankan, hanya umumnya terdapat kecenderungan lebih kuat untuk berubah daripada mempertahankannya. Sedangkan menurut Straus (1963, dalam Susongko, 2003) perubahan ruang tidak akan mengubah struktur dalam sebagai nilai landasan masyarakat bersikap, walaupun struktur luar sebagai wujud fisik ruang mengalami perubahan. Sukadi (2003) mengungkapkan pula pandangan Strauss tersebut-dikenal sebagai teori strukturalisme, bahwa struktur luar mengalami transformasi sedangkan struktur dalam relatif tetap.

Pentingnya mempertahankan ruang sakral sebagai bentuk menjaga pluralisme masyarakat tradisional dalam konteks

perencanaan keruangan diungkapkan oleh Sudaryono (2006). Sudaryono menyampaikan pula bahwa pendekatan keruangan yang selama ini bersifat deterministik-rasionalistik telah banyak menuai kritik, khususnya karena ketidakmampuan mengakomodasi nilai-nilai pluralisme dan kepentingan masyarakat pada skala komunitas dan lokal. Oleh karena itu, Sudaryono (2006) mengungkapkan perhatiannya terhadap konsep penguatan ruang lokal termasuk ruang sakral sebagai bagian dari ruang-ruang lokal.

1.1.2 Posisi Kajian Persepsi dan Respon Masyarakat dalam Konteks Perubahan Ruang Sakral

Terdapat keterkaitan antara persepsi dan respon seseorang atau sekumpulan orang mengenai sesuatu hal. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmat, 2007). Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus). Perilaku merupakan keadaan jiwa (berfikir, berpendapat, bersikap dan sebagainya) untuk memberikan masukan munculnya respon terhadap situasi di luar subjek tertentu. Perilaku ditentukan oleh persepsi dan kepribadian. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa respon merupakan tanggapan atas persepsi seseorang mengenai sesuai hal. Respon ini dapat bersifat positif (tanpa tindakan) dan bersifat aktif (dengan tindakan) (Umar, 2003).

Perubahan ruang sakral sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat akan memberikan persepsi dan respon akibat dorongan dan tekanan yang akan melakukan perubahan ruang sakral baik yang berupa ruang publik ataupun ruang privat. Persepsi dan respon tersebut juga akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralan ruang. Persepsi dan respon yang dihasilkan dapat

menggambarkan pula masih terjaganya atau sudah hilangnya nilai-nilai adat tradisional. Dalam konteks budaya, persepsi dan respon dapat dinyatakan sebagai wujud nilai/norma dan aktivitas yang merupakan unsur-unsur budaya menurut Koentjaraningrat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian mengenai persepsi dan respon menjadi penting dalam memperkaya pemahaman perubahan ruang sakral.

1.1.3 Hubungan Konsepsi Ruang Relasional serta Kajian Persepsi dan Respon Masyarakat dalam Perubahan Ruang Sakral

Menurut Davoudi (2009), sejak periode 1960 an sampai 1990an terdapat perubahan paradigma perencanaan dalam memaknai ruang dan tempat. Pada awal periode tersebut terdapat perubahan paradigma dalam interpretasi keruangan (*interpretation of spatiality*) dan konsepsi tentang tempat, mulai dari positivism, structuralism dan kemudian post-structuralism. Menurut pandangan positivism, ruang sebagai eucludian dianggap sebagai kontrainer netral (*neutral container*), sedangkan menurut paradigma structuralism, ruang dianggap diproduksi dan dikonsumsi secara sosial. Kemudian menurut paradigma berikutnya berupa post-structuralism menganggap bahwa ruang diproduksi secara budaya melalui penerapan konsepsi ruang relasional, secara lebih khusus berupa triad (tiga serangkai) ruang, yang mencakup kajian representasi ruang, praktek ruang dan ruang representasional. Konsepsi triad ruang ini dikembangkan oleh Lefebvre pada tahun 1991 melalui bukunya yang berjudul *Production of Space* serta literatur terkait lainnya. Lefebvre menandai transisi pandangan teorisasi ruang dari structuralism ke pandangan yang lebih baru berupa post structuralism.

Gatrell (2006) mengungkapkan bahwa Lefebvre melalui konsepsinya dapat menguraikan struktur pemahaman ruang

dengan menjelaskan terdapatnya praktik tata ruang sehari-hari, melakukan pengamatan kegiatan dan hubungan antara aktor-aktor dalam ruang serta mendefinisikan, memediasi, dan atau mempromosikan konsepsi praktik dan pengalaman antara ruang dan tempat. Lebih lanjut, melalui interpretasi terhadap konsepsi ruang relasi yang dikembangkan Lefebvre, akan terbangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai situasi perencanaan dengan mempertimbangkan perbedaan sosio spasial dan pendalaman keterkaitan yang ada (Carp, 2008).

Berdasarkan pemahaman ruang relasional tersebut, peneliti menganggap bahwa pendekatan konsepsi ruang relasional dapat digunakan untuk menjelaskan persepsi dan respon masyarakat dalam perubahan ruang sakral. Unsur-unsur konsepsi ruang relasional tersebut mencakup kekuatan ekonomi dan politik yang mempengaruhi perubahan ruang sakral; persepsi dan respon masyarakat akibat dorongan dan kekuatan yang akan melakukan perubahan ruang sakral, pemahaman masyarakat tentang hakekat ruang sakral serta pola perubahan ruang sakral yang terbentuk. Selain itu, dapat diuraikan pula elemen-elemen berupa pengetahuan masyarakat mengenai ruang sakral dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang sakral tersebut sebagai elemen yang mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan penelitian tentang identifikasi persepsi dan respon masyarakat dalam perubahan ruang sakral.

Adapun sasaran dalam penelitian ini yakni memahami persepsi dan respon masyarakat dalam perubahan ruang sakral.

II. METODA PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Metoda penelitian yang baik mempersyaratkan hubungan metoda yang digunakan dan operasionalisasinya dengan kajian teori dan konsep yang diteliti (Meyer dan Greenwood, 1980). Oleh karena itu langkah yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup serangkaian tahapan berupa 1) penyusunan konsep pendekatan dalam bentuk formulasi perumusan masalah dan kerangka pendekatan dari hasil kajian pustaka, 2) penyusunan metoda penelitian dalam bentuk rumusan penentuan populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data dan analisis 3) implementasi tahapan penelitian dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan data, perumusan analisis dan kesimpulan serta review terhadap teori terkait.

Penelitian ini berupa studi kasus. Dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat ditemukan realitas atau fenomena yang terjadi pada ruang sakral Desa Kuta dalam bentuk gejala atau proses sosial. Proses-proses sosial tersebut sangat erat kaitannya dengan pola-pola kebudayaan, termasuk ruang Desa Kuta sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Stake (Endraswara 2003:77), bahwa kasus boleh sederhana atau kompleks, tetapi yang lebih ditekankan adalah memilih kasus yang benar-benar spesifik.

2.2 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Desa Adat Kuta yang diarahkan sebagai salah satu kawasan wisata. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan-pertimbangan bahwa kawasan Kuta telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Pada penelitian ini, ruang sakral yang dikaji mencakup 7 jenis terdiri atas 4 jenis zona parahyangan, 2 jenis zona pawongan dan 1 jenis 1 zona palemahan. Ketiga zona tersebut

menunjukkan karakteristik dan tingkat kesakralan berbeda. Kriteria pemilihan obyek/ruang sakral tersebut terdiri atas menunjukkan nilai kesakralan; masih dapat ditemui saat sekarang, dan menunjukkan adanya kecenderungan pengaruh/dampak kegiatan jasa, perdagangan atau industri wisata.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipilih ruang/obyek sakral yang dikaji yakni:

1. Zona Parahyangan terdiri atas Pura Dalem Kahyangan (bagian dari Pura Kahyangan Tiga), Pura Dalem Tunon (salah satu jenis Pura Dadia), Sanggah (Pura Keluarga), dan Pura Pesanggaran (dikelola oleh nelayan).
2. Zona Pawongan terdiri atas pekarangan, dan bale banjar.
3. Zona Palemahan berupa catus patha

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data terdiri dari 2 kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang sifatnya mendukung data kualitatif. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk uraian kalimat atau pernyataan-pernyataan, baik yang berasal dari kondisi sosial/budaya yang diteliti maupun informasi dari berbagai narasumber, seperti masyarakat, pemerintah, dan pengusaha (pariwisata). Sedangkan data kuantitatif terkait dengan penjumlahan atau kuantifikasi informasi yang ditemukan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, seperti jumlah penduduk dan lainnya.

Selanjutnya sumber data dikelompokkan dalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, baik dari proses wawancara dengan para informan maupun observasi terhadap situasi nyata yang terjadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, dan

berbagai referensi lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan perubahan ruang di Desa Adat kuta.

2.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposif (bertujuan), yaitu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perubahan ruang sakral di Desa Adat Kuta. Teknik purposif ini juga didasarkan atas tujuan yang ingin dicari oleh peneliti dalam menghasilkan data yang sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mengkaji secara mendalam, maka digunakan snow ball sampling, yakni dimulai dengan tokoh desa dan banjar kemudian berlanjut tokoh lainnya.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Mereka membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap, retrospektif, dan sesuai dengan kondisi setempat sebenarnya. Informasi mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang dan maksud penelitian. Informan berasal dari kelompok masyarakat (desa, banjar, seka), lembaga pemerintah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan) serta pengusaha (hotel, perundangan jasa).

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial yang terjadi digunakan metode deskriptif. Dalam penggunaan metode deskriptif teknik utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah: (1) observasi lapangan yaitu pengamatan dan terlibat langsung di daerah penelitian, (2) wawancara, dan (3) kepustakaan. Kegiatan survai dilaksanakan dua kali pada saat awal dan pendalaman.

2.6 Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Pelaku observasi secara efektif dan terstruktur perlu didukung oleh bermacam-macam alat yang bisa digunakan dalam situasi yang berbeda. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *chek list* dan alat-alat mekanik (kamera, alat perekam, dan sebagainya). Wallace (1990:57) menyatakan, untuk penelitian ilmu sosial, instrumen yang bisa dipakai dapat dikelompokkan atas dua bagian umum yang melibatkan organ indrawi manusia yang dilengkapi dengan teknologi, berupa fotografi, perekam dan sebagainya.

Sementara itu, agar penanya (interviewer) memperoleh keterangan dan penjelasan dari pemberi informasi secara sistematis, diperlukan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara. Kemudian pada bagian berikutnya dikaji bagaimana relasi antar pemahaman ruang tersebut untuk menghasilkan tujuan dan sasaran.

Adapun instrumen yang digunakan yaitu:

1. Fokus Pertanyaan :

- Bagaimana persepsi masyarakat akibat dorongan perubahan ruang sakral serta elemen pengaruh persepsi ruang sakral?
- Elemen pengaruh persepsi masyarakat mencakup pengetahuan, aktivitas dan pemaknaan masyarakat mengenai ruang sakral.
- Bagaimana respon masyarakat terhadap dorongan perubahan ruang sakral?

2. Lingkup Elemen Triad Ruang:

- Ruang Persepsi (*Perceived Space*) atau Praktek Ruang (*Spatial Practice*)
- Ruang Hidup (*Lived Space*) dan Ruang Representasi (*Representational Space*)

3. Indikator:

- Persepsi masyarakat adat akibat dorongan perubahan ruang sacral
- Persepsi masyarakat adat terhadap upaya pemerintah dan pelaku kepentingan dalam mempertahankan atau melemahkan ruang ruang sakral
- Pengetahuan masyarakat adat mengenai konsep ruang adat Bali
- Pengetahuan masyarakat adat mengenai peran ruang sakral, Kegiatan warga adat dalam pemanfaatan ruang sakral
- Pemaknaan masyarakat adat tentang hakekat ruang ruang sakral
- Respon warga adat mempertahankan dan melindungi ruang ruang sakral

4. Data/Informasi:

- Persepsi masyarakat adat akibat dorongan perubahan ruang sakral
- Persepsi masyarakat adat terhadap upaya pemerintah dan pelaku kepentingan dalam mempertahankan atau melemahkan ruang ruang sakral
- Pengetahuan masyarakat adat mengenai konsep ruang adat Bali
- Pengetahuan masyarakat adat mengenai peran ruang sakral
- Kegiatan warga adat dalam pemanfaatan ruang sakral
- Pemaknaan masyarakat adat tentang hakekat ruang ruang sakral

- Respon warga adat mempertahankan dan melindungi ruang ruang sakral

5. Teknik Pengumpulan Data/Informasi: Wawancara mendalam melalui snowballing interview sampai jenuh

6. Sumber: Pengurus dan anggota desa dan banjar

7. Alat yang Digunakan: Daftar pertanyaan, rekaman, kamera, catatan

2.7 Teknik Analisis

Teknik analisis yang melandasi penelitian ini adalah analisis diskriptif, kualitatif dan interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Wuisman (1996: 300) menyatakan, analisis data kualitatif adalah sistem klasifikasi deskriptif atau klasifikasi kronologis yang mencakup jumlah keterangan yang terkumpul dan menunjukkan keterkaitan secara sistematis.

Dalam analisis data, langkah-langkah yang dilakukan disesuaikan dengan anjuran Miles dan Huberman (1992:15-19) yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data adalah merangkai dan menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dan mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan dalam bentuk teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan, sehingga semua informasi yang disusun mudah terlihat dan dimengerti. Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan, yakni dengan maksud menguji kebenaran, kecocokan, dan validitas makna-makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, kesimpulan meningkat menjadi lebih rinci dan menjadi kesimpulan akhir yang utuh.

2.8 Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif baik berupa kata dan kalimat maupun menggunakan tabel dan gambar (peta, diagram, dan foto). Penyajian tersebut juga dilakukan dengan penggabungan cara-cara tersebut.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Persepsi dan Respon Perubahan Ruang Zona Parahyangan

Perubahan fisik ruang dinilai berdasarkan kriteria perubahan/penambahan fungsi, perubahan radius jarak fisik dengan bangunan terdekat, perubahan tinggi bangunan terdekat dan batas pandang, serta orientasi arah (termasuk orientasi horisontal dan vertikal). Zona parahyangan terdiri atas elemen ruang berupa Pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa), pura dadia, pura keluarga, dan pura-pura lainnya. Kajian detail dalam penelitian ini dikhususkan pada pura Dalem Kahyangan, pura Dalem Tunon, pura Pesanggaran, dan pura keluarga tiap rumah (sanggah).

3.1.1 Pura Dalem Kahyangan

A. Persepsi dan Respon dalam Perubahan Ruang

Persepsi masyarakat terhadap kekuatan yang akan mengubah ruang pura umumnya negatif atau tidak memberikan dukungan.

Pura *Dalem Kahyangan* berada pada ruas jalan Tegal Wangi. bahwa pada bagian timur Pura *Dalem Kahyangan* terbangun ruko bertingkat 3 yang berada pada jarak dekat (± 3 meter) dengan pagar (*penyengker*) pura. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Dalam pandangan masyarakat, keberadaan bangunan ruko tersebut semestinya tidak diizinkan oleh pemerintah, mengingat fungsi tempat ibadah yang membutuhkan ketenangan termasuk juga

aspek kesucian agama.

Gambar 1. Kondisi Bangunan di Sekitar Pura *Dalem Kahyangan*



Berkaitan dengan masalah tersebut, salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai mengatakan sebagai berikut :

Sri Empu Mantan Pemangku :

“Pembangunan ruko bertingkat di sebelah Pura *Dalem Kahyangan* Tiga menurut aturan Parisada Hindu itu tidak diperbolehkan pak, posisinya harus dibatasi paling dekat 5-15 meter dari penyengker. Kalau tinggi bangunan pun perlu dibatasi maksimal 4 lantai.

Pada saat awal pembangunan ruko tersebut juga cukup banyak protes dari warga, karena di sana ada kepercayaan tentang radius kekeramatan pura itu, dan tidak ada yang berani tinggal di sana ..sekarang ruko itu juga tidak laku,

Tetapi untuk maksud bersembahyang kalau menurut Agama Hindu tidak mempengaruhi tersampainya kepada Tuhan dengan atau tidaknya ruko karena Tuhan itu bebas dalam ruang dan waktu. Walaupun demikian, sebenarnya warga merasa terganggu dan mempermasalahkan keberadaan ruko tersebut. tetapi karena sudah diberikan izin...ya sudah terlanjur bagaimana lagi pak”

Seorang krama adat lain, memberikan penjelasan juga sebagai berikut :

Warga sebenarnya merasa keberatan...Tetapi mau bilang apa, karena sudah mendapat izin..Kelihatannya

mereka sudah bicara dengan bendesa..setahu saya sebenarnya tidak boleh membangun di sekitar pura apa lagi dengan jarak yang cukup dekat...Tetapi yang membangun itu bukan orang Bali ya... Adat melarang itu...Kadang saya tidak mengerti, karena kadang-kadang beberapa hal telah dilanggar..."

Salah seorang *kelian* menyampaikan pula bahwa:

"Dulu ini aslinya lahan sekitar *Pura Dalem* adalah tegalan.Kalau dulu *penyengkernya* tidak terganggu, tetapi sekarang kalau sampai masuk itu yang kita salahkan.Tembok tokonya masuk itu salah itu."

Persepsi sebagian besar warga menyatakan bahwa pembangunan ruko relatif mengganggu kesakralan pura *Dalem Kahyangan*, hanya sebagian kecil saja yang menyatakan bahwa keberadaan tidak mempengaruhi kesakralan pura.Alasan warga adat yang menyatakan terdapatnya pengaruh terhadap kesakralan pura disebabkan fungsi tempat ibadah yang relatif perlu ketenangan serta kesucian dari aspek fisik dan spritual.

Pada tabel berikut terlihat prosentase persepsi responden terhadap keberadaan ruko sekitar Puri *Dalem Kahyangan*. Sebagian besar warga menyatakan persetujuan terhadap perubahan fungsi ruang sekitar pura. Tetapi tidak setuju terhadap penurunan radius jarak dan peningkatan intensitas ruang ruko yang dapat mengganggu.

Warga adat umumnya berpandangan bahwa mereka senantiasa mengakui, mempertahankan dan memelihara ruang pura, seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil wawancara juga

B. Pengetahuan Warga tentang Ruang Sakral dan Ruang Pura Dalem Kahyangan

Perera (2008) berpendapat bahwa banyak masalah perencanaan saat ini disebabkan oleh persepsi terutama dalam arti perencanaan yang secara sosial, politik dan budaya yang tidak sesuai dengan dan tidak memiliki empati dengan subyek nya.Dalam hal ini, survei berusaha untuk mengeksplorasi persepsi dan pengetahuan warga mengenai Pura Dalem Kahyangan.

Berdasarkan penyebaran kuesioner terungkap bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang tata aturan adat keberadaan ruang-ruang di zona *parahyangan*, *pawongndan* dan *palemahan*.Mereka mengakui bahwa ajaran *Trihita Karana* sebagai hal yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan ruang.Arah orientasi berupa *kaja kelod*, *nyegara-gunung* dan *kangin kauh* juga menjadi prinsip yang penting.Untuk bangunan bertingkat juga perlu pertimbangan konsep *Tri Hita Karana*.

Pengetahuan warga tentang ruang desa adat juga sudah diperoleh sejak pendidikan dasar baik melalui sekolah maupun orang tua. Hal ini disampaikan oleh Putu, Warga Banjar Tegal :

"Kalau terkait dengan masalah *Trihita Karana*, tentang konsep *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*, masyarakat diajarkan sejak SMP dan melalui pendidikan agama dan orang tua."

Pengetahuan dan pemahaman warga adat terhadap konsepsi dan nilai-nilai tradisional Bali terdiri atas konsepsi *Tri Hita Karana* (THK), konsepsi *Tri Angga* sebagai turunan THK berkaitan dengan konsepsi ruang, dan konsepsi *Sanga Mandala* sebagai turunan *Tri Angga* berkaitan dengan konsepsi imajiner pembagian ruang termasuk ruang desa atau permukiman. Dari hasil penyebaran kuesioner

diketahui bahwa sebagian besar memahami konsep-konsep tersebut.

Dengan adanya pemahaman tersebut juga mempengaruhi sikap dan tindakan warga masyarakat terhadap berbagai upaya mengurangi kesakralan ruang Pura *Dalem Kahyangan*. Respon warga tidak secara langsung melakukan perlawanan tetapi dengan melakukan pembicaraan dengan pihak pengelola ruko. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terjadinya penundaan pembangunan atau pembongkaran terhadap bangunan ruko yang ada.

C. Kebertahanan Aktivitas Upacara

Pura yang termasuk kelompok *Kahyangan Tiga*, masing-masing mempunyai hari *piodalan* (hari ulang tahun) tersendiri. Hari ulang tahun suatu pura ditentukan melalui hari diresmikannya pura tersebut. Hari peresmian biasanya dipilih hari yang baik sesuai dengan petunjuk dari pendeta dan selanjutnya ditetapkan sebagai hari *piodalan*. Kata *piodalan* adalah berasal dari kata *wedal* yang artinya lahir mendapat awalan pa dan akhiran an yang berarti tempat lahir atau kelahiran.

Waktu pelaksanaan hari *piodalan* pada tiap-tiap pura berbeda-beda, ada setiap enam bulan atau 210 hari, tetapi ada pula yang dilaksanakan setiap tahun. Upacara *piodalan* dari pura digolongkan pada upacara *Dewa Yajnya* yang merupakan salah satu dari lima jenis upacara atau *Panca Yajnya*. *Yajnya* berasal dari kata *jaj* yang artinya sembahyang. Dari akar kata ini lalu menjadi kata *yadnya* yang berarti persembahan kepada Hyang Widi dan manifestasinya.

Pelaksanaan upacara di Pura *Kahyangan Tiga* dilakukan secara berkala pada hari-hari tertentu, seperti upacara tiap bulan sekali yang disebut *rerainan* yang jatuh harinya sesuai dengan hari *piodalan* dan juga setiap hari purnama dan *tilem*. Upacara yang diadakan

berkala setiap 210 hari disebut hari *piodalan* dengan upacara yang lebih besar dari *rerainan*. Jenis upacara berkala yang lebih besar adalah karya *ngusaba*, karya *mamungkah* dan lain-lainnya.

Pada umumnya tiap-tiap pura *Kahyangan Tiga* mempunyai kekayaan khusus yang disebut *laba pura* atau kalau di Jawa pada jaman Hindu disebut tanah *perdikan* dari suatu candi. *Laba pura* biasanya dalam bentuk tanah yang luasnya tergantung pada kemampuan dari desa adat. Hasil dari penggarapan tanah dimanfaatkan untuk kepentingan biaya upacara *rerainan*, *piodalan* dan juga untuk biaya memperbaiki kerusakan dari bangunan-bangunan yang ada di dalam pura. Kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan suatu pura disebut: *krama pura*.

Untuk menunjukkan rasa baktinya kepada Hyang Widi dan *Batara Batari*, ketika upacara *piodalan* masyarakat menghaturkan *sesajen* yang disebut *banten piodalan* dan *banten perseorangan* dari anggota *krama pura*. *Banten piodalan* dapat dibedakan atas beberapa jenis seperti *banten sor*, *catur* dan lainnya. Jenis *bebanten* mana yang akan dilaksanakan tergantung pada kemampuan dari para *krama pura*. Selain menghaturkan *sesajen* ketika upacara *piodalan* berlangsung, diiringi pula dengan gamelan dan tari - tarian suci keagamaan. Jenis tarian yang dipentaskan adalah tari *sanghyang*, *pendet* dan lainnya. Tujuan dari pementasan tarian ini adalah untuk menyambut kedatangan kekuatan suci pada saat masyarakat mengadakan kontak dan mohon keselamatan bagi warganya. Karena itu sering dikatakan bahwa munculnya jenis-jenis tarian di Bali pada mulanya adalah diabdikan untuk kepentingan agama dan baru kemudian berkembang menjadi seni kemasyarakatan yang ditandai munculnya kreasi- kreasi baru dalam seni tari di Bali.

Upacara *pidalan* dan jenis-jenis upacara berkala di Pura *Kahyangan Tiga* diantarkan oleh seorang pendeta tetapi upacara kecil yang disebut *rerainan* diantarkan (diselesaikan) oleh seorang pemangku dari pura itu sendiri. Untuk desa-desa kuna upacara diselesaikan oleh seorang *Jero Gede* atau semacam *pemangku*. Ketika pendeta memuja, para krama pura sudah siap di halaman dalam untuk melaksanakan pemujaan. Setelah selesai memuja maka pendeta menuntun jalannya persembahyangan hingga selesai.

Pandangan dari Kelian Banjar Pande, I Wayan Wardya

“Upacara pada pura *Dalem Kahyangan* yakni *nebusin* setelah upacara *ngaben*. Setelah *ngaben* selesai ada upacara rentetannya yaitu upacara *penyekahan/memukur*. Sebelum itu biasanya warga itu ke pura *Dalem* untuk memanggil dan meminta ijin yang diupacarai lebih lanjut. Bilamana terjadi dalam rumah ada yang sakit lama tidak sembuh, perlu minta ijin ke pura *Dalem*, melalui *nebusin*. Beda tujuan upacara untuk orang sakit dan untuk orang meninggal.

Upacara lain di pura *Dalem* terdiri atas *odalan* atau hari jadi pura dengan waktunya setiap 6 bulan sekali.

Kemudian selanjutnya sebelum hari raya *Galungan* ada upacara *Sugihan Jawa*, barulah *Galungan*. Jadi tahapannya sebelum *odalan* yakni *Sugihan Jawa*, kemudian *Galungan*, dilanjut dengan upacara *kuningan*, kemudian enam bulan lagi berupa *pujowali/odalan*.

Upacara lain pada tanggal 7 desember dilakukan dalam rangka setiap *sasih kenem*. Sasi ke 6 tersebut berarti bulan mati yang diadakan melalui upacara *nanhluk merane* untuk tolak bala. Prosesinya dari masing—masing banjar sebanyak 13 banjar. Prosesinya diawali dengan upacara yang dilakukan di *Catus Patha* atau di pertigaan jalan

dan selanjutnya kembali ke pura *Dalem Kahyangan*.

Secara rutin tidak hilang upacara-upacara yang dilakukan di Pura *Dalem Kahyangan* itu, dan secara filosofi pura *Dalem* itu terkait dengan Dewa Siwa ya pak. Ya siwa atau pelebur. Secara makna pura *Dalem* merupakan tempat peleburan”.

Gambar 2. Kondisi Kegiatan di Pura *Dalem Kahyangan* dan Kegiatan di Sekitarnya



Dari uraian sebelumnya tersebut dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan upacara yang dilaksanakan di Pura *Dalem Kahyangan* berlangsung sesuai dengan aturan adat. Jenis dan frekuensi tidak ada perubahan seperti yang disampaikan pula oleh warga adat.

D. Pemaknaan Mendalam Ruang Pura *Dalem Kahyangan*

Pandangan bahwa nilai ritual sebenarnya dipengaruhi secara pikiran maka adanya kontradiksi ruang antara pura *dalem* dengan keberadaan ruko tidak mempengaruhi komunikasi dengan Tuhan, seperti disampaikan oleh Sri Empu, Mantan Pemangku.

“Tetapi untuk maksud bersembahyang kalau menurut Agama Hindu tidak mempengaruhi tersampainya kepada Tuhan dengan atau tidaknya ruko karena Tuhan itu bebas dalam ruang dan waktu. Walaupun demikian, sebenarnya warga merasa terganggu dan mempermasalahkan keberadaan ruko tersebut. tetapi karena sudah diberikan izin...ya sudah terlanjur bagaimana lagi pak”

Walaupun demikian, untuk ruang sakral pada zona pawongan atau palemahan masih dimungkinkan ada perubahan yang tidak mempengaruhi kesakralan. Perubahan pemanfaatan ruang melalui *desa-kala-patra* dimungkinkan karena adanya kebutuhan perubahan lokasi, waktu dan kondisi. Konsep *desa kala patra* yang menjelaskan keterkaitan antara lokasi, waktu dan kondisi, dapat dipadukan dengan konsep *rwa-bhineda* yang menunjukkan kondisi yang berubah dan kondisi yang *ajeg* (tidak berubah). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pitana (1994) dan Geriya (2000) bahwa kedua konsep tersebut menimbulkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sebagaimana dinyatakan. Seorang tokoh adat Nyoman Sudira, Banjar Anyar menyampaikan pula bahwa

“Perubahan walaupun terjadi..tetapi prinsip-prinsipnya tidak berubah..tiyang yakin bahwa masyarakat masih memegang teguh landasan tata ruang tradisional termasuk dalam mempertahankan pura..masyarakat umumnya tidak akan berpikir melakukan pelanggaran ruang pura terutama bila dikaitkan dengan prinsip *rwa bhineda*.”

Pandangan Nengah Desna, *kelians* salah satu banjar mengungkapkan

Desa adat Kuta ini lebih fleksibel ya pak, terhadap hal tersebut ya pak, beda dengan yang di Padang Sambian, kadang berbeda-beda dibali itu. Iya pak, tergantung sudut pandang ya pak, karena

warga desa adat Kuta sudah terlalu sibuk dengan kegiatan ekonomi disini, sehingga kami tidak sempat hingga mengurus kepentingan lain, mungkin mereka masih ada waktu untuk berfikir tentang itu sehingga mereka punya waktu yang lebih banyak untuk itu.

Walaupun sibuk ya pak nilai adat dan sakral tidak hilang ya. Kalau terkait adat, saat ada kegiatan upacara dan kegiatan keagamaan di desa adat Kuta, kita tidak bisa lepas dengan *panca yadnye*, itu aturannya setiap kita melangkah kita tidak bisa melakukan sendiri dan perlu gotong royong, dan ada hukum sosial yang tidak tertulis namun tersirat, seperti tolong menolong dalam kegiatan banjar, dan mereka akan ingat untuk tolong menolong“

Sejalan dengan siklus hidup manusia mulai dari lahir sampai mati maka kebutuhan sarana melalui kegiatan upacara mutlak menjadi diperlukan. Kesemuanya mejadi dasar pendirian Pura *Desa*, Pura *Puseh* dan Pura *Dalem Kahyangan*. Pura *Dalem Kahyangan* merupakan pura dengan fungsi peleburan. Hal ini seperti disampaikan oleh Bendesa Kuta, Wayan Swarsa

“Setiap pura kahyangan tiga mempunyai fungsi berupa pusat kegiatan, kemakmuran, dan kematian. Untuk pura *Dalem Kahyangan* memiliki fungsi sebagai peleburan. Dalam filosofi Hindu terdapat fase kehidupan. Keberadaan pura *Dalem Kahyangan* menjadi pendukung pelaksanaan upacara berkaitan dengan siklus hidup tersebut. Sehingga perubahan kesakralan pura *dalem* mempengaruhi “

Ida Bagus Rai, tokoh masyarakat Kuta mengungkapkan pula bahwa keberadaan Pura *Dalem Kahyangan* sebagai bagian dari Pura *Kahyangan Tiga* sudah ada sejak lama. Hal tersebut menjadi ikatan kuat pula upaya untuk mempertahankan keberadaan pura dimaksud.

“Sejak dulu desa adat sudah punya *Kahyangan Tiga* karena *Kahyangan Tiga* itu adalah tempat untuk berkumpul dan melakukan upacara ritual sebagai bagian kehidupan termasuk lahir dan mati. *Kahyangan Tiga* ini sudah ada sejak jaman Kerajaan Badung dulu. Itu yang menjadi ikatan kuat *desa pekraman. Kahyangan tiga* yang mengikat kekuatan budaya. Kalau puri tidak merupakan kekuatan, dan puri sejak zaman merdeka pemerintahan sudah berbeda. Pemerintahan bukan terkait dengan puri tetapi bupati, walikota dan gubernur. Hal ini seperti *Kahyangan Tiga* yang di Denpasar dikuasai walikota dan menjadi tanggung jawab walikota. Kondisi sekarang mulai tergerus lokasi hunian baru. Seperti kawasan Kuta yang dibangun oleh developer, dan akan mempengaruhi pula kawasan desa adat yang ada sekarang. Dan itu yang menimbulkan kekhawatiran akan mempengaruhi desa adat, dan sejak ada UU Desa, mereka harus ikut ke bagian desa adat tersebut.”

Bendesa Kuta menyampaikan pula salah satu *tantra* yang dipahami bahwasanya terdapat latar belakang penting pembangunan pura sebagai tempat turun dan tinggal para dewa.

Dari salah satu *Tantra Samuccaya*serta penjelasannya diungkapkan bahwa ;

“Para dewa tidak hanya berkenaan untuk turun dan tinggal di Tirtha (Patirthan), di tepi sungai, dan danau, tetapi juga di tepi pantai, pertemuan dua atau lebih sungai-sungai, dan kuala (muara sungai), di puncak-puncak gunung atau bukit-bukit, di lereng-lereng pegunungan, di hutan, di semak belukar dan kebun atau taman-taman, dekat tempat-tempat yang dirakhmati atau pertapaan, di desa-desa, kota-kota dan di tempat-tempat lain yang membahagiakan

Pura atau kahyangan dibangun di tempat-tempat yang dianggap suci. Tempat-tempat yang dianggap suci disebutkan pada bagian awal dari tulisan ini, yakni di

Tirtha atau Patirthan, di tepi sungai, tepi danau, tepi pantai, pertemuan dua atau lebih sungai-sungai yang di Bali disebut Campuhan, sedang di India disebut dengan nama Saògam yang mengandung makna sama, yakni bertemunya dua sungai atau lebih.

Tidak mengherankan leluhur umat Hindu di Bali membangun pura di mana saja hampir di seluruh Bali dan Bernet Kempers, seorang ahli purbakala memberi julukan pulau yang kecil ini sebagai “*Land of One Thousand Temples*“, pulau dengan seribu pura (1977: 73). Di samping itu berbagai julukan telah diberikan kepada pulau yang memikat ini di antaranya adalah: “*The Last Paradise on Earth*“(sorga terakhir di bumi), “*The Morning of the World*” (paginya dunia), “*The Island of Gods*“(pulau dewata), “*The Intresting Peacefull Island*” (pulau penuh kedamaian yang sangat mempesona).

Pura dibangun untuk memohon kehadiran Sang Hyang Úiva dan Úakti dan Kekuatan/Prinsip Dasar dan segala Menifestasi atau Wujud-Nya, dari element hakekat yang pokok, Páthivi sampai kepada Úakti-Nya. Wujud konkrit (materi) Sang Hyang Úiva merupakan sthana Sang Hyang Vidhi. Hendaknya seseorang melakukan permenungan dan memuja-Nya) Di samping hal tersebut, dengan memperhatikan pula praktek upacara yang masih tetap hidup dan terpelihara di Bali maupun di India, yakni pada saat menjelang upacara piodalan (di India disebut abhiseka), para devatà dimohon turun ke bumi, di Bali disebut “nuntun atau nedunang Ida Bhappàra, di India disebut avahana, sampai upacara persembahyangan dan mengembalikannya kembali ke kahyangan sthana-Nya yang abadi menunjukkan bahwa pura adalah replika dari kahyangan atau sorga.

Sebagian besar warga masyarakat memahami tentang kesakralan pura *dalem kahyangan*. Hal ini ditujukan dengan pengetahuan bahwa pura

dalem kahyangan merupakan salah satu diantara pura-pura *kahyangan* tiga yang menjadi syarat terbentuknya desa adat. Respon ini merupakan hasil jawaban dari penyebaran kuesioner terhadap tokoh dan warga masyarakat, serta wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat.

Salah seorang kelian menyampaikan pandangan tentang hakekat Pura *Dalem Kahyangan*

Pura yang penyungsungnya atau pemujanya berasal dari satu wilayah atau teritorial yang sama disebut *Pura Kahyangan Tiga*. *Pura Kahyangan Tiga* memiliki tiga macam pura yang masing-masing merupakan tempat pemujaan *Trimurthi* (perwujudan *Sang Hyang Widhi*), yakni Pura Desa, Pura *Puseh*, dan Pura *Dalem*. Untuk Pura *Dalem Kahyangan* yaitu pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa *Siwa*, yaitu perwujudan *Ida Sang Hyang Widhi* sebagai *Sang Pelebur*. Pura ini biasanya terletak di dekat kuburan desa, di tepi, atau di luar desa. Kata *dalem* secara harfiah berarti jauh atau sulit dicapai. Disebut demikian karena dalam kenyataannya Dewa *Siwa* adalah sulit dicapai oleh manusia karena beliau adalah *niskala, wyapi-wyapaka* (ada dimana-mana).

Pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa *Brahma*, yaitu perwujudan *Ida Sang Hyang Widhi* sebagai pencipta alam semesta. Pura ini letaknya di pusat desa dan biasa disebut sebagai Pura Desa. Pura yang diperuntukkan untuk memuja Dewa *Wisnu*, yaitu perwujudan *Ida Sang Hyang Widhi* sebagai pemelihara alam semesta. Pura ini disebut Pura *Puseh* dan letaknya berdekatan dengan Pura Desa “.

Gambar 3. Kondisi Pura *Dalem Kahyangan*



Gambar 4. Kondisi Pusat Kegiatan di Sekitar Pura *Dalem Kahyangan*



Dari penyebaran kuesioner dapat ditambahkan pula bahwa Pura *Dalem Kahyangan* menjadi syarat salah satunya bagi pendirian desa adat. Demikian pentingnya peran Pura *Dalem Kahyangan* ini menjadi penentuan keberadaan desa adat.

Dari uraian sebelumnya dapat diungkapkan bahwa persepsi dan respon penolakan terhadap dorongan perubahan ruang Pura *Dalem Kahyangan*, dipengaruhi pula pemahaman warga tentang adanya aturan yang mengatur ruang sakral, fungsi ruang sebagai tempat upacara dan terganggunya aktivitas upacara. Kondisi ini dapat terjadi di semua wilayah yang menyatakan adanya perubahan ruang sakral.

3.1.2 Pura Dalem Tunon

A. Persepsi dan Respon dalam Perubahan Ruang

Persepsi masyarakat relatif dapat menerima kekuatan yang kemungkinan akan mengubah ruang pura Dalem Tunon. Kondisi ini disebabkan karena pengelola hotel cukup mematuhi aturan yang ada. Warga masyarakat cukup memberikan persepsi positif tentang tidak adanya radius jarak yang dilanggar serta tidak adanya penurunan radius atau kesakralan pura.

B. Pengetahuan Warga tentang Ruang Pura Dalem Tunon

Berdasarkan penyebaran kuesioner terungkap bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang tata aturan adat keberadaan ruang-ruang di zona *parahyangan*, *pawongndan* dan *palemahan*. Mereka mengakui bahwa ajaran *Trihita Karana* sebagai hal yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan ruang. Arah orientasi berupa *kaja kelod*, *nyegara-gunung* dan *kangin kauh* juga menjadi prinsip yang penting. Untuk bangunan bertingkat juga perlu pertimbangan konsep *Tri Hita Karana*.

Selain itu warga umumnya mengenal pura *Dalem Tunon*. Walaupun pada saat awal pura ini dikhususkan untuk keluarga puri (kerajaan) *Dalem Kaleran*, tetapi selanjutnya dapat dimanfaatkan warga adat secara keseluruhan.

C. Kebertahanan Aktivitas Upacara

Dalam pelaksanaan upacara di Pura *Dalem Tunon* tidak ada perbedaan dengan upacara di Pura *Dalem Kahyangan*. Bahkan keikutsertaan upacara menjadi semakin meningkat tidak hanya melibatkan pihak keluarga.

“Pura Dalem Tunon itu digunakan untuk odalan galungan, kuningan, dan juga adanya barong-barong. Kalau untuk luar

keluarga, upacaranya boleh dilakukan pula dalam Pura Dalem Tunon..Adapun upacaranya berupa *puja wali*, setiap 6 bulan bali, atau tiap 6x35 hari..sebagai 1 bulan bali.”

Kondisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh warga tentang komitmen dalam mengikuti kegiatan keagamaan.

D. Pemaknaan Mendalam Ruang Pura Dalem Tunon

Pemaknaan mendalam ruang pura dapat diungkapkan berdasarkan beberapa pandangan berikut ini.

Pandangan Nengah Desna Kel Tb Sari yang menyampaikan proses perubahan ruang budaya Pura *Dalam Tunon*

“Pura Dalem Tunon merupakan pura keluarga yang berkait dengan Puri Dalem Kaleran. Kalau sejarahnya menurut orang tua saya, Puri Dalem Kaleran sebagai hunian bagian kerajaan pada saat itu. Kerajaan dimaksud merupakan bagian dari kerajaan yang lebih besar..kerajaan tersebut memiliki kuburan sendiri, sehingga didirikan lah Pura Dalem Tunon. Pura Dalem Tunon merupakan perwujudan stana Dewa Siwa. Keberadaan Puri Dalem Kaleran dan Pura Dalem Tunon tersebut diwariskan hingga generasi sekarang dan selanjutnya. “

Kelian Banjar Buni juga mengungkapkan bagaimana kerjasama antara pihak Puri dengan desa adat serta warga adat

“Pura dalam tunon itu miliknya puri, Kalau dalam tunon murni puri yang punya, jadi kita warga desa itu, tidak berkaitan dan kita tidak mau tahu gitu . Saya tidak mencermati itu karena tidak kewajiban bagi kita, puri dalam tunon itu.. Tetapi kemudian pura Dalem Tunon sudah bs dimanfaatkan untuk seluruh warga desa adat sehingga saya dan warga dapat ikut terlibat pula

Sebelum desa adat terbentuk secara rapi, puri menguasai desa ini dulu, karena puri masih keturunan arya serta memegang wilayah kuta bagian selatan . Puri tetap mengundang kita jika ada kegiatan, kita tidak boleh bentrok antara puri dengan desa adat, dan disini puri punya rakyat, tetapi tidak semua desa adat itu adalah rakyatnya“

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diungkapkan bahwa sebagian besar menganggap pura *Dalem Tunon* sebagai tempat pemakaman dan mengandung nilai historis. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Gede Mayun, Kelian Tegal menyampaikan fungsi Pura *Dalem Tunon* sebagai kawasan suci.

Kami memiliki hak untuk memberikan izin tetapi tetap dalam pemberian izin itu mempertimbangkan penyanding juga kesepatan dengan pihak puri sebagai pengelola pura

Kelian Banjar Buni

“Kalau pura pesanggaran sebagai tempat Gajah Mada datang pertama kali untuk menyerang kerajaan Klungkung.Kalau dulu puranya agak ke dalam seperti sekarang ditepi pantai karena adanya abrasi.Dulu batu karang banyak dipakai, dan kemudian didukung Tomy Winata dan banyak memberikan bantuan sehingga banyak perubahan, yang pasti nelayan tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Tomy Winata sebagai pemilik hotel Kartika menyukai adat bali dan dialah yang menyumbang dan memperbaiki pura .

Pada tahun 1343, perahu- perahu yang berisikan pasukan Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit berlabuh di selatan Pantai Kuta untuk melakukan Bali.Begitu perahu yang banyak mendarat di pesisir pantai selatan tersebut, masyarakat kemudian

menyebutnya dengan Pasih Perahu.Pasih merupakan Bahasa Bali yang berarti laut, sehingga pasih perahu dapat diartikan lautan perahu. Tempat berlabuhnya Gajah Mada menjadi pemujaan yang sekarang dikenal dengan nama Pura Pesanggaran. Di Bali pesanggaran berarti tempat persinggahan atau tempat peristirahatan.

Gajah Mada yang bermaksud menanamkankan pengaruh Majapahit di Bali kemudian memberi nama pelabuhan di pantai selatan tersebut dengan nama Tuban, sebuah nama yang sama dengan nama desa di Jawa, kemudian tempat berlabuhnya Gajah Mada di sebelah utara dinamakan Cangu. Kedua nama tempat itu, kini telah menjadi desa di Bali. Sedangkan diantara kedua pelabuhan Tuban dan Cangu itu dinamakan Kuta yang berarti benteng.“

Dari uraian sebelumnya dapat diungkapkan bahwa persepsi dan respon penolakan terhadap dorongan perubahan ruang Pura *Dalem Tunon*, dipengaruhi pula pemahaman warga tentang adanya aturan yang mengatur ruang sakral, fungsi ruang sebagai tempat upacara dan terganggunya aktivitas upacara. Kondisi ini dapat terjadi di semua wilayah yang menyatakan adanya perubahan ruang sakral.

3.1.3 Pura Pesanggaran

A. Persepsi dan Respon dalam Perubahan Ruang

Persepsi masyarakat relatif dapat menerima dorongan kekuatan yang kemungkinan akan mengubah ruang pura *Pesanggaran*. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa pengelola hotel cukup mematuhi aturan adat yang ada. Warga masyarakat cukup memberikan persepsi positif tentang tidak adanya radius jarak yang dilanggar serta tidak adanya penurunan radius atau kesakralan pura.

Pandangan perubahan pura Pesanggaran menurut Gede Mayun, Klian Tegal ;

“Keberadaan pura *Pesanggaran* yang berkaitan dengan dengan pembangunan hotel. Pura *Pesanggaran* yang ada didalam hotel dan harus masuk lewat hotel dan berada di dalam hotel *Kartika Plaza* dan seperti pura di hotel *Kartika* ada pura *Pesanggaran* dan mereka menggunakan lahannya dijadikan tempat parkir”

B. Pengetahuan Warga tentang Ruang Pura *Pesanggaran*

Secara umum, pengetahuan warga mengenai Pura *Pesanggaran* meliputi pemahaman pura sebagai tempat pemujaan, perlunya mempertahankan radius jarak fisik, serta keberadan jalan di sekeliling pura sebagai upaya untuk dapat mengelilingi pura. Selain itu terdapat pula beberapa pengetahuan lain yang menggambarkan bahwa warga relatif memahami karakteristik umum pura *pesanggaran*.

C. Kebertahanan Aktivitas Upacara

Dalam pelaksanaan upacara di Pura *Pesanggaran* tidak ada perbedaan dengan upacara di *Pura Dalem Kahyangan*. Bahkan keikutsertaan upacara menjadi semakin meningkat tidak hanya melibatkan pihak keluarga tetapi juga masyarakat lainnya. Pada tabel berikut ini diungkapkan bahwa sebagian besar warga relatif menyampaikan persepsi tetap aktifnya kegiatan upacara dan pendukungnya.

Pandangan Nengah Desna

“Semakin berkurangnya jarak bangunan di sekitar pura maka kita berfikir positif saja karena kalau itu mengganggu tidak akan jalan. Kita sangat fleksibel dengan hal seperti itu dan kita tidak terlalu fanatik dengan hal itu. Namun kita tidak mengurangi makna dan tetap bersujud bakti kepada yang agung kepada Tuhan. Kalau radius pura itu saya setuju dan mengerti, tapi dampak yang lambat laun berkembang, apakah bisa selalu seperti itu

?dan akhirnya akan ada tuntutan kehidupan dan kebutuhan. Lahan yang terbatas dan perkembangan manusia yang terus bertambah, dan untuk 50-100 tahun kedepan, apakah lahannya itu masih terus ada untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan yang ada?”

D. Pemaknaan Mendalam Ruang Pura *Pesanggaran*

Pemaknaan tentang hakekat ruang pura *pesanggaran* mencakup hal sebagai berikut yakni terkait dengan upaya untuk memperkuat ikatan sosial dan sebagai tempat pemujaan.

Terdapat pula Nengah Desna/Gede Mayun

“Pura *Pesanggaran* dulu adalah pura yang digunakan oleh nelayan, karena nelayan mencari nafkah di laut, sehingga mereka yang mengurus pura *Pesanggaran*. Pura *Pesanggaran* menjadi bagian komplek hotel *Kartika Plaza*. Untuk kegiatan upacara tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu, hal ini terjadi karena pemilik hotel Bapak Tommy Winaya sangat menghargai budaya Bali, dan beliau sering memberikan sumbangan saat akan dilakukan upacara, sumbangan tersebut berupa bantuan dana dan alat kesenian gamelan “.

Dari uraian sebelumnya dapat diungkapkan bahwa persepsi dan respon penolakan terhadap dorongan perubahan ruang Pura *Pesanggaran*, dipengaruhi pula pemahaman warga tentang adanya aturan yang mengatur ruang sakral, fungsi ruang sebagai tempat upacara dan terganggunya aktivitas upacara. Kondisi ini dapat terjadi di semua wilayah yang menyatakan adanya perubahan ruang sakral.

3.1.4 Sanggah

A. Persepsi dan Respon

Perubahan arah orientasi tersebut mendapat respon dari masyarakat adat baik tokoh maupun *krama* (warga) dikaitkan dengan

aturan adat yang berlaku. Sebagian besar berpandangan bahwa ada aturan adat yang dilanggar tetapi mereka memahami bahwa kondisi tersebut sulit dihindari terkait perkembangan kegiatan yang pesat sehingga menyebabkan semakin terbatasnya lahan pekarangan.

Bagi sebagian tokoh adat menyampaikan pula bahwa perubahan arah orientasi tersebut menyangkut *seradah* (kepercayaan) tentang arah sujud orang Bali ke arah matahari terbit. Kesemuanya diterjemahkan menjadi bangunan-bangunan seperti *padmasane* berhadapan dengan *pemendak* (pemuja), juga *kaja-kangin*. Perubahan arah orientasi akan menimbulkan *keletuhan* (ketidaksucian), dan *kegeringan* (wabah penyakit). Mereka menganggap menjadi penting tidak berubahnya tempat, bentuk dan arah. Selain itu diungkapkan pula bahwa rumah bertingkat dan di atasnya dibangun *sanggah* itu tidak bagus karena kesucian tidak terjaga dengan baik.

Salah satu tokoh adat menyampaikan pula

“Memang pembangunan pura di lantai tertinggi membuat lebih modern, tapi apakah masih mempertimbangkan nilai kesucian? Ya karena tidak ada pemisahan antara kegiatan sehari-hari berupa tidur, buang hajat, hubungan suami isteri dengan kegiatan keagamaan..Selain itu pula tidak ada hubungan langsung pura dengan tanah (napak pertiwi)...Ya jadinya sebagian warga membuat talang penghubung antara ruang pura dengan tanah..Tetapi juga bisa dengan menempatkan tanah di bawah pondasi lantai 2 itu masih diperbolehkan”

Tokoh adat yang lain yakni Nengah Desna, *Kelian* Bj Tebe Sari menyampaikan

“Kalau dilihat dari aturan adat memang tidak diperbolehkan, tetapi dengan situasi dan kondisi yang ada menjadi tidak memungkinkan untuk dibangun

horisontal...Untuk tanah seluas 1 are tidak mungkin pura dibangun dengan panjang 4m x 4m...tetapi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal bisa kita kondisikan bahwa sanggah dibangun di lantai 2 Kalau memang kita punya lahan besar bangunannya memang dibangun horisontal, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa sanggah pindah ke lantai 2 “

Demikian pula *Kelian* Banjar Tegal yakni Gede Mayun menyampaikan bahwa

“Ya memang seharusnya sanggah langsung kena ke tanah, kalau lantai 2 kurang tepat dan menyalahi aturan tetapi karena perkembangan zaman maka kita tidak dapat mengikuti aturan itu.. Jadi perlu menyesuaikan tuntunan ekonomi seperti pula di Legian dimana sebagian sanggahnya ada dilantai 2”

Persoalan perubahan arah orientasi pura tersebut menjadi perhatian pula Parisada *Hindu Dharma Indonesia* (Majelis Tertinggi Agama Hindu) yang mengeluarkan ketentuan pura pada bangunan rumah bertingkat. Ketentuan yang dikeluarkan pada tahun 1990 tersebut memperkenankan bangunan pura pada tingkat paling atas sepanjang memenuhi syarat kesucian. Dengan ketentuan tersebut, memberikan pemahaman kepada warga adat bahwa pembangunan pura pada rumah bertingkat diperbolehkan. Hal tersebut dapat dilihat pada persepsi warga tentang perubahan arah orientasi pura.

Walaupun demikian warga sebagian besar tetap menganggap bahwa arah orientasi horisontal dianggap lebih suci dibandingkan arah orientasi vertikal. Hal ini dapat dilihat dari persepsi responden.

B. Pengetahuan Warga tentang Ruang Sanggah

Pengetahuan warga tentang ruang sanggah umumnya memiliki pengetahuan yang mencukupi.

C. Aktivitas dalam Pemanfaatan Ruang Sanggah

Perubahan orientasi sanggah ke arah vertikal, tidak mengurangi keaktifan warga dalam melaksanakan upacara adat. Mereka seperti lazimnya melakukan upacara seperti biasa, seperti yang diungkapkan oleh Kelian Dewa Made Oke, Banjar Jaba Jero

“Untuk aktivitas upacara dirumah, dari habis memasak nasi, dari pagi kita sudah mengaturkan sesajen, kemudian setelah masak sebelum makan kita persembahkan dulu, ada untuk burung dan ternak, juga untuk orang tua yang sudah mendahului. Kita percaya beliau datang, dan kita buat juga, dan dianggap beliau masih hidup, masing-masing *pelinggih* kita kasih“

“Ya dari pagi itu ya pak, baru melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sesajen disediakan setiap pagi, kalau kita punya bayi kita sediakan sesajen untuk tidak diganggu. Kita sediakan permen, untuk tempat kita menaruh ari-ari biar tidak diganggu oleh saudara-saudaranya. Paling hanya sembahyang, kalau pagi sama malam pak Kalau sembahyang lamanya tergantung kita masing-masing, kalau saya seringnya pagi kalau malam pas anak-anak tidur baru kita sembahyang biar khusyuk sembahyangnya”

D. Pemahaman Mendalam Ruang Pura Keluarga (sanggah)

Penyebaran kuesioner untuk memahami pemaknaan pada umumnya jawaban terdiri atas

- Sudah sejak lahir sebagai tempat pemujaan Hyang Widhi;
- Kegiatan upacara berupa pengabenan, pernikahan dan upacara yadnya lainnya dilakukan di sanggah ini,
- Sanggah ini perlu dijaga dari nilai etika agar tidak mengurangi kesucian tempatnya kaarena *sanggah* ini

sebagai bentuk untuk memohon *kaweruhan* (kepintaran)

Kesemua jawaban responden menunjukkan terdapatnya pemaknaan ruang yang mendalam terhadap keberadaan dan pemanfaatansanggah pada tiap rumah.

3.2 Persepsi dan Respon Zona Pawongan

3.2.1 Pekarangan

A. Persepsi dan Respon

Persepsi dan respon masyarakat terkait tekanan ekonomi dan sosial memberikan dorongan adanya perubahan ruang pekarangan. Tekanan ekonomi berupa dorongan untuk mengubah ruang pekarangan dengan kegiatan usaha produktif seperti penginapan, *artshop* dan lainnya. Sedangkan dorongan sosial berupa penambahan anggota keluarga yang membutuhkan lahan areal baru, sehingga warga kemudian mengubah sebagian ruang pekarangannya. Walaupun demikian aturan adat tetap menjadi pertimbangan dalam proses perubahannya.

B. Pengetahuan Warga tentang Ruang Pekarangan

Pengetahuan warga mengenai perubahan ruang relatif lengkap.

C. Kebertahanan Aktivitas Upacara

Berdasarkan wawancara dan penyebaran kuesioner, warga relatif secara rutin melakukan upacara.

D. Pemaknaan Mendalam Ruang Pekarangan

Pemaknaan ruang pekarangan terdiri dari :

- Rumah dan pekarangan ini menjadi kenangan sejak kecil dan menjadi sekarang
- Rumah dan pekarangan ini memiliki obyek yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan sosialisasi dengan

anggota keluarga yang lain

- Pekarangan yang sekarang dimanfaatkan untuk kegiatan bisa menguntungkan

Menurut Agung sebagai warga Banjar Temacun menjelaskan bahwa ;

“Konsep yang digunakan pada pekarangan saya menggunakan konsep madya kecil yang terdiri dari pura, *merajan bale daje*, *bale delot* dan setelah *bale delot* terdapat dapur dan WC, jika dilihat dari bentuknya mengacu dan mengadopsi *asta kosala kosali*.”

Menurut Nengah sebagai mantan Ketua Bappeda Provinsi Bali menyampaikan perubahan ruang yang terjadi pada pekarangan

“Untuk mengatur dan mengendalikan pekarangan diatur dengan memberi jarak dengan sempadan samping dengan panjang 1 meter setiap sisinya. Dan untuk rumah yang ada saat ini, telah menunjukkan perubahan karena pada saat membangun rumah, terbatas dengan lahan yang ada pada kawasan perkotaan.

Untuk di wilayah Kuta memenuhi aturan pekarangan sudah sangat sulit dilakukan, saat ini *bale* barat (*bale dauh*) dan timur (*bale dangin*) sudah tidak ada, hampir semua *bale* timur dirubah kalau di tepi jalan jadi toko yang di sebelah barat di belakang jadi kosan, untuk orang Kuta sedangkan *bale* utara wajib (*bale bengong/bale daja*) menunjukkan *prestige* atau kelas sosial yang dibangun semegah-megahannya, *bale delod* ada, *bale sekenem* ada, dan *secepat* juga ada tempat untuk menjalankan upacara, *pawon* juga sudah menyatu, *aling-aling* sudah tidak ada, *tiang sanga* sudah tidak ada (tiang besar), juga *jineng* (lumbung) tidak ada.”

3.2.2 Bale Banjar

A. Persepsi dan Respon dalam Perubahan Ruang

Persepsi masyarakat relatif dapat menerima dorongan kekuatan yang kemungkinan akan mengubah *bale banjar*. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran mematuhi aturan adat yang ada. Warga masyarakat cukup memberikan persepsi positif tentang hal yang harus dipertahankan di *bale banjar* seperti fungsi dan peranannya serta tata letaknya.

B. Pengetahuan tentang Ruang Bale Banjar

Bale banjar merupakan fasilitas sosial pada *palemahan desa* adat, yang saat ini sudah banyak terjadi perubahan baik secara tatanan bangunan dan fungsinya. Berdasarkan penyebaran kuesioner diketahui bahwa masyarakat adat cukup memahami peran *bale banjar* (lihat tabel berikut)

Berikut adalah bentuk-bentuk pandangan tentang perubahan pada *bale banjar*.

Pandangan Gede Mayun *Kelian* Tegal terhadap perubahan pada *bale banjar* .

“Pada *bale banjar* yang ada saat ini terjadi perubahan, tetapi perubahan yang terjadi tidak signifikan, kalau di banjar secara fungsi ruang banjar sudah berubah, ruangan paling atas dimanfaatkan untuk ruang olahraga, dan ruang bawah dimanfaatkan untuk ruang kesenian. Untuk bangunan *bale banjar* yang masih asli terdapat pada *bale banjar* di Banjar Pandai dan yang ada di dekat perempatan *bemo corner*. *Bale banjar* yang asli dijaga karena memiliki nilai sejarah dan usianya yang sudah tua dan hanya dilakukan renovasi tanpa melakukan pembongkaran”.

Pandangan Gusti Agung Sukinta, *Kelian Banjar* Temacun terhadap perubahan pada bale banjar

“Perubahan yang terjadi pada *bale banjar* di Banjar Temacun mulai tahun 2014 sudah terjadi banyak perubahan fungsi yang diarahkan pada fungsi komersial, sedangkan dari segi bentuk fisik bangunan tidak berubah dan fungsi bale banjarnya tetap sama.. Fungsi komersial pada bale banjar diperuntukan untuk kebutuhan dan kepentingan bale banjar”

Pandangan Sri Empu, terkait *bale banjar* adalah sebagai berikut .

“*Bale banjar* sama dengan pura ada beberapa hal yang ada disana mengenai batas banjar tidak boleh langsung tembok akan tetapi perlu ada jarak bangunan. Bangunan tidak boleh satu tembok dengan balai banjar.Kalau sekarang lahan sudah kritis sehingga hal ini menjadi polemik.Otonomi di Bali dari dulu sudah ada.”

Gambar 5. Kondisi Bale Banjar Pada Tahun 1970



Pandangan Made Oka, selaku *Kelian Jaba Jero* terkait *Bale Banjar*

“Untuk di temacun tidak terdapat bale banjar, yang penting ada pura untuk kegiatan rapat, pertemuan dan upacara, perubahan tantangan bangunan dan fungsi bangunan saat ini juga dijadikan sebagai lahan bisnis karena letaknya yang strategis. *Bale banjar* di sini membutuhkan dana 3 miliar yang bersumber dari dana iuran, sumbangan

dan bantuan pengusaha yang dibutuhkan untuk perbaikan fisik *bale banjar*. Keuangan yang ada di *bale banjar* di gunakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan upacara”

C. Aktivitas pemanfaatan ruang *bale banjar*.

Warga tetap mengikuti kegiatan upacara yang dilaksanakan di *Bale Banjar* Temacun

Pandangan Gede Mayun, *Kelian Tegal* terhadap perubahan pada *bale banjar* .

“Banjar secara fungsi ruang banjar sudah berubah, ruangan paling atas dimanfaatkan untuk ruang olahraga, dan ruang bawah dimanfaatkan untuk ruang kesenian. Untuk bangunan *bale banjar* yang masih asli terdapat pada bale banjar di banjar pandai dan yang ada di dekat bemo corner. *Bale banjar* juga di manfaatkan sebagai tempat berkumpul dalam menyiapkan kegiatan upacara, baik dari segi persembahan untuk pura, maupun kegiatan kesenian.“

Wawancara dengan Nyoman Dana

“Hal ini juga berdampak perubahan pada Desa Adat Kuta, dimana dirasakan suatu dorongan untuk lebih-lebih lagi membentengi diri, lebih-lebih lagi mempetahankan jati diri ditengah genangan arus modernitas.Membuat Desa Adat lebih berfikir kritis untuk membentengi masyarakatnya namun tetap bersifat terbuka dan ramah terhadap modernitas tersebut.Di dalam hal inilah dapat terlihat Desa Adat Kuta sebagai pelindung dari pada Budaya Bali di Kuta. Seka-seka di Banjar terus dijaga keakraban dan kedekatan kekerabatannya, tetap dilakukan kegiatan-kegiatan *mesanthi, mesatua*, Seka Gong terus mengadakan pembelajaran, Seka Tari terus mendidik dan mengasah kemampuan penari-penarinya. Melalui kebiasaan daripada kegiatan-kegiatan itu masyarakat Kuta pun merasa harus tetap pada Akar Budayanya”

Ngayah sesibuk apapun tidak boleh ditinggalkan, dan bagaimana membuat Odalan semakin meriah dengan banten-banten yang tak terhitung. Dengan begitu keakraban dan rasa kepemilikanpun tetap terjaga. Walaupun modernitas menggerus namun rasa kepemilikan akan budaya tak akan mempan digerus karena adanya selalu kerinduan untuk selalu dekat dengan lingkungan budayanya.”

Wawancara dengan Pande Made Darma,

Banjar tidak pernah terlihat sepi ketika diadakan perkumpulan, Seka-Seka tetap berjalan, bahan *Ngayah* tetaplah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh seluruh masyarakatnya. Inilah bukti dari Usaha-Usaha desa Adat dalam menjaga awig-awig Desa Kuta. Dengan bersama-sama setiap banjar di bawah naungan Desa Adat Kuta bergandengan untuk menjaga keorisinilan budaya mereka.

Kegiatan budaya di bale banjar dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada 13 (tiga belas) *krama banjar* di bawah naungan Desa Adat Kuta. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan wujud nyata *awig-awig* yang telah disesuaikan di masing-masing *banjar*. Masing-masing *banjar* telah memiliki *pararam* sebagai kesepakatan *krama banjar*. Kegiatan-kegiatan dimaksud berupamekakawin (menembang), menari, *ngayah* (kerja bakti) dan lain sebagainya, termasuk juga dilaksanakan di Bale Banjar Temacun berdasarkan hasil wawancara dengan *kelian banjar*.

Wawancara dengan I Nyoman Rika

“Terlihat contohnya ketika ada upacara-upacara di Kuta masyarakatnya selalu ramai dan upacaranya terlaksana meriah dan *banten* atau sesajian untuk dewasebagai bentuk syukur yang dihaturkanpun lengkap dan megah”

Menurut Ketut Nugroho tokoh masyarakat Kuta memberikan pandangan tentang fungsi *bale banjar* sebagai ruang ekonomi dan

lingkungan .

“*Bale banjar* saat ini masih berfungsi dengan baik, dan *bale banjar* sudah memiliki pembiayaan yang mandiri untuk mengopang kegiatan banjar, pembiayaan banjar dikelola melalui LPD , sumber pendapatan desa berasal dari kas desa yang bersumber pada iuran, sumbangan, dan bantuan dari pengusaha. Banjar ini masih menjadi wadah komersial atau tempat usaha namun bukan suatu yang salah bila mana banjar atau desa itu menjadikan tempatnya menjadi tempat koperasi, dan tujuannya untuk kepentingan warganya, sebagai untuk koperasi dan badan usaha milik desa dan hasilnya untuk dana kegiatan banjar dan peningkatan kesejahteraan warga.”

Wawancara dengan *Kelian Banjar Buni*

“Kita tetap menjaga prinsip lama sesuai fungsi banjar, sebagai tempat berkumpul dan bersenang-senang jadi lebih baik untuk kegiatan pendidikan dan bukan untuk kegiatan komersial ... Kalau dikontrak ke pihak lain nanti ada perbedaan fungsi. Adapun kalau untuk kegiatan ekonomi mungkin memanfaatkan tenaga banjar untuk mengelola bisnisnya.. Dari adat ada sebenarnya menyerahkan pengambil keputusan kepada *kliyan* tetapi dengan tetap mempertimbangkan masukan warga banjar”

Dalam pelaksanaan upacara di bale banjar tidak ada perbedaan dengan upacara di pura lainnya. Bahkan keikutsertaan upacara menjadi semakin meningkat tidak hanya melibatkan pihak keluarga tetapi juga masyarakat lainnya. Pada tabel berikut ini diungkapkan bahwa sebagian besar warga relatif menyampaikan persepsi tetap aktifnya kegiatan upacara dan pendukungnya.

D. Pemaknaan Mendalam Ruang Bale Banjar

Sebagian besar warga masyarakat memahami tentang *Bale Banjar*. Hal ini didasarkan pada

pengalaman hidup. Respon ini merupakan hasil jawaban dari penyebaran questioner terhadap tokoh dan warga masyarakat, serta wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat.

3.3 Persepsi dan Respon Zona Palemahan (*Catus Patha* atau Pempatan Agung)

A. Persepsi dan Respon dalam Perubahan Ruang *Catus Patha*

Masyarakat relatif memahami bahwa keleluasan ruang pada saat pelaksanaan upacara merupakan hal yang penting. Sedangkan persepsi terhadap kawasan di sekitar *catus patha*, masyarakat relatif dapat menerima dorongan kekuatan yang kemungkinan akan mengubah ruang kawasan sekitar *catus patha*. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa pengelola perdagangan dan jasa cukup mematuhi aturan adat yang ada. Warga masyarakat cukup memberikan persepsi positif tentang hal yang harus dipertahankan di sekitar *catus patha* seperti fungsi dan peranannya serta tata letaknya.

B. Pengetahuan Dan Pemaknaan Perubahan Ruang

Pandangan dari tokoh dan masyarakat berkaitan dengan definisi dari *Catus patha* beberapa responden memiliki jawaban sebagai berikut :

Made Wendra mantan Bendesa :

“*Catus patha* adalah salah satu palemahan yang berupa perempatan yang dikelilingi oleh perempatan lainnya, dan setiap desa adat memiliki *Catus patha*. Mengapa *Catus patha* yang ada di Kuta tidak dikelilingi puri ? karena dulunya Kuta bukan merupakan pusat kerajaan dan Kuta hanya dijadikan tempat pelarian. *Catus patha* yang ada di Kuta dikelilingi oleh Pura Puseh, yang letaknya di dekat pasar seni dan terdapat Pura Dalem dan sesuai letaknya pada perempatan *Bemo Corner* yang di tentukan sebagai *Catus patha* di Kuta yang juga lokasi yang dikelilingi

oleh 13 banjar di desa adat kuta. Dulu letak *Catus patha* di Kuta berada pada lokasi perempatan dekat dengan kantor kelurahan dan sekarang dipindahkan pada lokasi pada perempatan *Bemo Corner*. Upacara yang dilakukan pada lokasi perempatan agung adalah upacara-upacara menjelang perayaan nyepi, dan upacara lainnya seperti, *nangluk merane* atau upacara menjauhkan bencana dan membuang sial. *Catus patha* juga disebut sebagai pasar agung, dimana dimaksudkan dari sisi kegaiban tempat tersebut merupakan lokasi bertemunya energi positif dan negatif dan suasananya digambarkan sebagai pusat keramaian dan alun-alunnya alam gaib”.

“ Keberadaan *Catus Patha* yang merupakan salah satu bagian dari ruang budaya dan merupakan salah satu bagian dari palemahan memiliki fungsi sebagai kawasan suci didukung terdapatnya perempatan agung, pura desa dan alun-alun. Sedangkan pada desa-desa pegunungan, terdapat pengutamaan orientasi arah luan-teben dan *Catus patha* juga merupakan orientasi pusat desa.”

Terdapat beberapa informasi tentang pemaknaan lokasi *Catus patha* seperti yang disampaikan oleh Sri Empu :

“*Catus patha* memiliki fungsi sebagai pusat konsentrasi dan secara filosofi diibaratkan sebagai sentral dalam struktur tubuh manusia. *Catus patha* berfungsi sebagai poros bumi sebagai penghubung ke atas dan ke bawah penyatuan dari semua unsur. Letak *catus patha* berada pada persimpangan pada empat arah mata angin. Lokasi *catus patha* di Kuta tidak mengikuti bentuk *catus patha* pada desa adat yang sudah berumur tua, kalau untuk di Kuta *Catus patha* terletak pada perempatan di dekat pasar seni.

Lokasi *Catus patha* saat ini terlalu kecil untuk aktivitas upacara sehingga sering mengganggu aktivitas di sekitar lokasi *Catus patha*, dan sering dilakukan pengalihan arus lalu lintas jika sedang

diadakan upacara di lokasi perempatan agung. Baiknya lokasi disekitar *Catus patha* dijadikan tempat usaha, kalau digunakan sebagai lokasi pemukiman tidak dianjurkan saat membangun rumah atau lokasi usaha perlu juga dilakukan upacara”.

Bendesa Adat Kuta menyampaikan lokasi persimpangan yang mengelilingi perempatan agung yang di antaranya adalah sebagai berikut :

“Ada kriteria perempatan yang dimaksudkan menjadi *Catus patha* di kuta yang ada di *Bemo Corner*, di antaranya terdapat pelinggih/pura di sekitar persimpangan agung tersebut. Perempatan yang bertemu perempatan lagi di depannya yang salah satunya adalah perempatan Banjar Temacun, juga bertemu dengan persimpangan di Legian di *Grand Mars*, ketemu pertigaan, jadi untuk di Kuta ini *Catus patha* digunakan sebagai lokasi upacara-upacara menjelang nyepi dan upacara-upacara lainnya, sebetulnya *Catus Patha* ini adalah pasar agung, kalau dari kegaiban energi itu bertemu di situ sebagai pasar agung atau pusat keramaian, seperti alun-alun’.

Bagus Rai, Sejarawan, memberikan penjelasan tentang *catus patha* adalah sebagai berikut :

“Lokasi *Catus patha* tidak bisa dirubah, karena sampai saat ini *Catus patha* yang telah digunakan merupakan simbol fanatisme yang sudah melekat di masyarakat dan sulit untuk merubah lokasinya. Tapi, masyarakat sekarang yang sudah melek hukum, dan fleksibel, dan sudah mengetahui kalau itu tempat bisnis mungkin lokasi dapat berubah di depan pura, tapi kalau orang dari jaman dulu berfikirnya saklek, jika lokasinya harus disitu tidak bisa berpindah. Jaman dulu lokasi pusat kegiatan bukan terletak pada *Catus patha*, lokasi pura dan pasar berada di pinggir jalan dan untuk pasar masih menggunakan bilik”.

Made Wendra, mantan bendesa Kuta, memberikan penjelasan tentang perubahan lokasi *Catus patha* yang dijelaskan sebagai berikut :

“Dulu lokasi *Catus patha* di perempatan dekat kantor lurah kemudian berpindah ke Bemo corner, pemindahan terkait desa. Alasan kepindahan *Catus patha* perlu dikelilingi pertigaan, sedangkan di perempatan dekat kantor kelurahan tidak dikelilingi pertigaan atau perempatan lainnya. Sehingga pindah ke Bemo corner, desa adat baru-baru ini bisa mengadakan upacara pecaruan sasi/nangluk merane di *catus patha* desa adat perlu memiliki *Catus Patha* karena acaranya upacara perlu dilakukan dengan rutin..kepindahan juga belum terlalu lama di musabe desa sekitar 1997 dulu *nangluk merane* di Denpasar saja dan mengikuti saja. Sebelum 1997 di kabupaten, karena terkait dana yang membutuhkan dana, untuk pecaruan cukup besar juga pembiayaannya”.

Sebagian besar warga masyarakat memahami tentang kesakralan lokasi *catus patha* hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan bahwa *catus patha* merupakan salah satu dari bentuk instrumen dari terbentuknya sebuah desa adat. Respon ini merupakan hasil jawaban dari penyebaran questioner terhadap tokoh dan warga masyarakat, serta wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat terkait dengan *catus patha*.

Menurut Kelian Banjar Buni memberikan pandangan terkait adanya bangunan komersil dan ramainya lokasi *catus patha* terhadap kesakralan dalam kegiatan Upacara berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“Kepadatan upacara dan letak perempatan agung di Bemo Corner tidak menjadi masalah dalam kegiatan upacara dan kesakralannya, untuk di *Catus Patha*

semakin ramai akan sebanyak ion yang berkumpul, dan ion negatif negatif bisa berkumpul di sana, dan waktu masyarakat mulai ramai dan memiliki tujuan untuk melempar sial, mencari selamat, mengundang roh dan kadang-kadang roh manusia yang tidak ketemu, dan akan dingaben, dan roh itu dicari ketempat umum yaitu ke catus patha, dan upacara tersebut juga merupakan perwujudan terima kasih dan akhirnya dibuat pelinggih kearah yang lebih lebar. Adanya kegiatan ekonomi ataupun komersial tidak menjadi permasalahan, karena hal ini ditunjukkan dari sifat adat yang dinamis “

C. Aktivitas dalam pemanfaatan ruang ‘Catus Patha’

Dalam pelaksanaan upacara diikuti oleh warga, bahkan keikutsertaan upacara menjadi semakin meningkat tidak hanya melibatkan pihak keluarga. tetapi juga masyarakat lainnya. Pada tabel berikut ini diungkapkan bahwa sebagian besar warga relatif menyampaikan persepsi tetap aktifnya kegiatan upacara dan pendukungnya.

Pandangan dari tokoh dan warga.

“Menurut warga, lokasi catus patha adalah pusat kegiatan upacara untuk menjelang nyepi dan kegiatan upacara *nangluk merane* dan disetiap perempatan agung pasti penuh sesak orang untuk menghadiri upacara tersebut, berpindahya lokasi catus patha ke perempatan agung dengan lokasi yang lebih luas sehingga dapat menampung kegiatan upacara dengan umat bersembahyang dengan lebih banyak”.

D. Pemahaman Makna Mendalam Catus Patha

Sebagian besar warga masyarakat memahami tentang *catus patha*. Respon ini merupakan hasil jawaban dari penyebaran questioner terhadap tokoh dan warga masyarakat, serta wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat.

Dewa Gde Mayun, Kelian Tegal menyampaikan

“Lokasi catus patha saat ini merupakan lokasi terpusat karena merupakan titik pertemuan yang berupa perempatan, dan catus patha seharusnya dikelilingi oleh kegiatan komersial dan pura desa, seperti yang ada di kuta, catus patha dikelilingi oleh lahan dengan pemanfaatan komersial dan pasar seni serta pura desa”.

IV. SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Berdasarkan kajian terhadap 7 (tujuh) jenis ruang-ruang sakral (Pura Dalem Kahyangan, Pura Dalem Tunon, Pura Pesanggaran, Sanggah, Pekarangan, Bale Banjar dan Catus Patha) pada 3 zona kesakralan (parahyangan, pawongan dan palemahan) di wilayah Desa Adat Kuta menunjukkan kecenderungan perubahan ruang. Terdapat beragam pola perubahan ruang sakral baik publik maupun privat terutama mencakup perubahan fungsi; perubahan tata letak dan orientasi; perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat; perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya; serta perubahan lokasi ruang sakral.
2. Pada zona parahyangan pola perubahan umumnya berupa perubahan fungsi, berkurangnya radius jarak dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan terdekat dan pandangannya ke arah obyek sakral yang melebihi batas serta orientasi arah. Pada zona pawongan berupa perubahan fungsi, perletakan bangunan, orientasi vertikal dan pada zona palemahan berupa perubahan lokasi (catus patha). Perubahan tersebut

- mengindikasikan mulainya kemunculan kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal.
3. Faktor pengaruh perubahan ruang sakral publik berupa *Pura Dalem Kahyangan*, *Pura Dalem Tunon*, *Pura Pesanggaran*, umumnya berupa tekanan pelaku usaha khususnya usaha hotel dan jasa yang didukung oleh pemerintah daerah. Sedangkan khusus ruang sakral publik berupa *catus patha*, perpindahan ke lokasi sekarang dipengaruhi kesepakatan warga adat yang didukung pula oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk ruang sakral privat berupa *sanggah* dan *pekarangan*, perubahan ruang merupakan respon warga terhadap tekanan sosial dan dorongan ekonomi dalam bentuk kebutuhan ruang hunian dan usaha.
 4. Persepsi warga pada perubahan ruang sakral publik, umumnya kurang menyetujui terhadap tekanan untuk mengubah ruang sakral khususnya pada *Pura Dalem Kahyangan* akibat timbulnya penurunan radius jarak kesakralan yang cukup besar. Mereka kemudian melakukan beragam respon berupa penolakan. Selain penolakan, terdapat pula respon lain dalam bentuk dialog mencakup unsur-unsur perubahan ruang yang memungkinkan disepakati. Persepsi dan respon tersebut, dipengaruhi pula oleh unsur pengetahuan warga atas ruang sakral, rutinitas aktivitas keagamaan/upacara pada ruang tersebut serta pemaknaan bahwa ruang tersebut patut dipertahankan. Selain itu diketahui pula terdapat dorongan mempertahankan kesakralan berupa upaya menjaga hubungan sosial selain upaya menyembah Tuhan.
 5. Persepsi warga pada dorongan perubahan ruang sakral privat, umumnya menganggap masih dimungkinkan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai bentuk antisipasi kebutuhan lahan hunian akibat penambahan anggota keluarga. Selain itu juga berupa kebutuhan peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kedua dorongan tersebut memberikan pengaruh pula pada perubahan sanggah di pekarangan. Respon yang dilakukan antara lain berupa penambahan fungsi komersial, dan pembangunan *sanggah* pada lantai 2 dengan tetap memperhatikan tata aturan adat lingkup pekarangan. Selain itu perubahan tersebut juga tidak mempengaruhi perubahan nilai dan aktivitas warga. Persepsi dan respon tersebut juga dipengaruhi pula oleh unsur pengetahuan warga atas ruang sakral, rutinitas aktivitas keagamaan/upacara pada ruang tersebut serta pemaknaan bahwa ruang tersebut patut dipertahankan.
 6. Persepsi dan respon tersebut mengindikasikan pula bahwa nilai dan aktivitas masyarakat adat masih bertahan. Kedua unsur tersebut merupakan unsur penting kebudayaan selain unsur ruang, menurut Koentjaraningrat. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa budaya masyarakat Kuta masih menunjukkan keberlanjutan walaupun terdapat penambahan nilai ekonomi sebagai pendorong perubahan.
 7. Dalam konteks ruang relasional, faktor politik ekonomi diwujudkan dengan proses pemaknaan ruang yang berlandaskan pada aspek mental atau pemikiran ruang dari aktor pelaku usaha, profesional, dan pemangku kepentingan, yang dikenal sebagai *conceived space/representation of space* (representasi ruang). Sedangkan faktor budaya diwujudkan dengan proses

- pemaknaan ruang yang berlandaskan aspek fisik dan sosial atau pemikiran ruang berdasarkan pemaknaan dan pengalaman hidup warga adat, yang dikenal sebagai *perceived space/spatial practice* (praktek ruang) dan *lived space/representational space* (ruang representasional). Pada kasus Pura Dalem Kahyangan yang mengalami perubahan kesakralan, pemangku kepentingan bersama pelaku usaha ruko kurang mempertimbangkan keberadaan pura khususnya radius jarang dan batas daya pandang ke arah pura. Pada kasus pekarangan rumah, penurunan kesakralan terkait dengan posisi bangunan yang ada dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang akibat penambahan anggota keluarga
8. Elemen-elemen yang mempengaruhi kemunculan keberartian ruang sakral yakni:
 - a. Keberadaan norma sakral
 - b. Pengalaman dan kesan religi warrga adat
 - c. Aktivitas upacara tetap dan meningkat
 - d. Upaya pertahanan dan perlindungan dari pemangku kepentingan dan pelaku usaha
 9. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemunculan dominasi ruang sakral, yakni:
 - a. Keberadaan norma sakral
 - b. Pengalaman dan kesan religi
 - c. Aktivitas upacara tetap dan meningkat
 - d. Kurang nya komitmen pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam melindungi ruang sakral.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Carp, J. (2008). “ *Ground-Truthing “ Representations of Social : Using Lefebvre’ s Conceptual Triad. Journal of Planning Education And Research, , 28, 129-142. (9 Mei 2011)*
- Davoudi, S., dan I. Strange. (2009) *Conceptions of Space and Place in Strategic SpatialPlanning. Royal Town Planning Institute: Routledge.*
- Dovey, Kim. (1979). *The Dwelling Experience: Towards A Phenomenology Of Architecture. Faculty of Architecture, Building and Town & Regional Planning, University of Melbourne. Melbourne*
- Eliade, M. (1959). *The Sacred and The Profane [translated from French Willard R. Trask]. A Harvest Book. New York.*
- Eliade, Mircea (2002),” *Sakral dan profane”*
- Endraswara, Suwardi. (2003) *Metodologi Penelitian Kebudayaan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Fainstein, (2005). *Planning Theory and The City, Journal of Planning Education and Research,*
- Harvey, D ., (1989). *The Condition of Post Modennity, Blackwell, Oxford.*
- Latour, B. (2004), *Politics of Nature. Harvard University Press London, London.*
- Latour, B. (2005) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press, Oxford.*
- Lauer, Robert H. (2003). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial (terjemahan). Erlangga, Jakarta.*
- Lefebvre, H. (1991), *The Production Of Space, Donald Nicholson-Smith Traans, Basil Blackwell,*

- Originally published 1974, Oxford.
- Levi Strauss (1963). “ *Structural Anthropology* ”, Basic Book, New York.
- Levi Strauss (1979),” *Myth and Meaning, Cracking the Code of Culture*”, Schocken Books, New York.
- Levi Strauss, Claude (1963), “*Structural Anthropolgy*” ,Basic Book, New York.
- Levi Straus, (1963). *Structured Anthropology*, Basic Book, New York.
- Maran, Rafael Raga, (2000), *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan). Jakarta : UII press
- Mills, A. (2006). *Boundaries of the nation in the space of the urban: landscape and social*.
- Mulkham, (2006), *Kearifan Lokal, Pembajakan Demokrasi*, Universitas Islam Nasional, Yogyakarta.
- Murdoch J., (2006). *Post Strukturalist Geography : a Guide to Relational Space*, Sage Pubication, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Rapoport, (1969). *House Form an Culture*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliff, NJ.
- Rapoport, Amos (1997). *Human Aspect of Urban Form*, Pergamon Pres, Oxford.
- Sandercock. (1998), *Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities*, Wiley, New York.
- Sasongko, I. (2006). *Pembentukan Ruang Berdasarkan Budaya Ritual*. Disertasi. ITS: Surabaya
- Sudaryono, (2006) : *Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 17/No 1, April 2006. ITB, Bandung.
- Suparlan, (2004). *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan*, Penerbit YPKIK, Jakarta.
- Suparlan, P. (1993) : *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Swyngedouw (2010) *Trouble with Nature: Ecology as the New Opium for the Mases*. In Hilier, J. And Healey, P. (Ed) *Planning Theory: Conceptual Challenges for Spatial Planning*. Ashgate.
- Swyngedouw, E . (1997). *Neither Global nor Local : ‘ Globalization and the Politics of Scale*, in : K. Cox (Ed). *Spaces of Glovalization*, 137-166. Guilford Press. New York.
- _____, UN-ISDR (2002), *Living with Risk : A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*, ISDR, Geneva.
- Wallace, W.L. (1990). *Metode Logika Ilmu Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wuisman, J.J.J.M.(1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas* (jilid 1 (. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.